

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi Daerah pada dasarnya merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam rangka mengelola pembangunan di daerahnya. Tujuan Otonomi Daerah antara lain, meningkatkan pemerataan pembangunan, kesejahteraan rakyat dan pelayanan publik, seperti yang tercantum dalam UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Menurut Karmeli et al., (2022), untuk mewujudkan tujuan Otonomi Daerah tersebut, maka pemerintah membuat kebijakan Desentralisasi Fiskal. Desentralisasi Fiskal yaitu penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri.

Menurut Rasu et al., (2019) melalui Otonomi Daerah, daerah diberikan kewenangan untuk mengambil keputusan di bidang fiskal yang meliputi aspek penerimaan maupun aspek pengeluaran. Tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pengembangan kehidupan berdemokrasi, keadilan, pemerataan, dan pemeliharaan hubungan yang serasi antar pusat dan daerah.

Menurut Syamsul, (2020), Desentralisasi Fiskal bisa memberi efek positif bagi Pemerintah Daerah. Efek positifnya antara lain Pemerintah Daerah lebih dekat dengan masyarakat, pejabat daerah memiliki informasi yang lebih baik tentang kebutuhan daerahnya. Pemerintah Daerah mampu menetapkan kebijakan yang optimal, meningkatkan efisiensi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan.

Faktanya di lapangan, untuk mewujudkan tujuan Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal tersebut bukanlah hal yang mudah, banyak kendala dan hambatan yang terjadi sehingga Otonomi Daerah selain memberi efek positif juga menimbulkan efek negatif. Menurut Christia & Ispriyarso, (2019) segi negatif Otonomi Daerah, yaitu 1) menciptakan fragmentasi dan keterpecahbelahan yang tidak diharapkan, 2) melemahkan kualitas pemerintahan, 3) menciptakan kesenjangan antar daerah yang lebih besar, dan 4) terjadinya penyimpangan arah demokrasi yang lebih besar.

Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal di samping memberikan efek positif juga menimbulkan efek negatif. Efek negatif yang ditimbulkan seperti raja raja kecil di daerah, *tax effort* yang rendah, munculnya fenomena *fly paper effect*, hingga maraknya kasus korupsi. Korupsi semakin menggerus kearifan lokal dan menggantinya dengan tabiat yang buruk, sehingga masyarakat miskin semakin bertambah miskin (Marselina, 2015).

Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah di negara manapun. Salah satu aspek penting untuk mendukung Strategi Penanggulangan Kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat. Pengukuran kemiskinan yang dapat dipercaya dapat menjadi instrumen tangguh bagi pengambil kebijakan dalam memfokuskan perhatian pada kondisi hidup orang miskin (BPS, 2018).

Menurut Daniel et al., (2021), kemiskinan merupakan masalah sosial yang bersifat global, artinya kemiskinan merupakan masalah yang harus dihadapi dan menjadi perhatian banyak orang. Fenomena kemiskinan terjadi pada banyak negara

di dunia, terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Masalah kemiskinan terasa berat dan sulit seolah-olah tidak dapat diatasi. Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia tergambar dalam Tabel 1.1 berikut ini.

Tabel 1.1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	Persentase penduduk miskin	Penurunan (persen)
2017	26.582,99	10,12	0
2018	25.674,58	9,66	-0,46
2019	24.785,87	9,22	-0,44
2020	27.549,69	10,19	0,97
2021	26.503,65	9,71	-0,48
2022	26.363,27	9,57	-0,14
Rata-rata		9,75	-0,1

Sumber : BPS (2023)

Menurut Berita Resmi Statistik tentang Profil Kemiskinan di Indonesia tahun 2017-2022, jumlah Penduduk Miskin Indonesia menurun dari 26.582,99 ribu jiwa atau 10,12 persen di tahun 2017, menjadi 25.674,58 ribu jiwa atau 9,66 persen di tahun 2018. Tahun 2019 turun menjadi 24.785,87 ribu jiwa atau 9,22 persen. Tahun 2020 terjadi kenaikan jumlah dan Persentase Penduduk Miskin cukup drastis, mencapai 27.549,69 ribu jiwa atau 10,19 persen, disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19 yang mengganggu aktivitas ekonomi dan mengurangi pendapatan masyarakat Indonesia. Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia pada tahun 2021 mencapai 26.503,65 ribu jiwa atau 9,71 persen menurun 0,48 persen poin terhadap September 2020, yang disebabkan karena ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan yang cukup baik. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2022 sebesar 26.363,27 ribu jiwa, atau 9,57 persen menurun 0,14 persen poin dibanding tahun 2021.

Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan di Indonesia dari tahun 2017-2022 rata-rata menurun sebesar 0,1 poin saja. Data Tingkat Kemiskinan yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil dari perhitungan BPS berdasarkan pada Garis Kemiskinan. Artinya yaitu nilai nominal yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar, yang meliputi kelompok makanan dan kelompok bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran saja. Sejatinya kita membutuhkan angka kemiskinan yang pasti dari banyak aspek selain ekonomi, seperti sosial, politik, hukum dll, yang membuat penduduk tetap miskin atau semakin miskin. Menurut Yunanto, (2015), kita tidak bisa menganalisa kemiskinan hanya dengan menggunakan patokan dasar adalah pendapatan per kapita. Menurut Adawiyah, (2020), masalah kemiskinan bersifat multi dimensional yang disebabkan oleh banyak faktor tidak hanya menjadi domain bidang ekonomi saja, tetapi juga politik, sosial, budaya dan sistem sosial lainnya.

Menurut Chriswardani Suryawati, (2005) bahwa penetapan pengukuran dan kriteria kemiskinan secara nasional sangat sulit. Diperlukan kajian yang dapat mengakomodasikan permasalahan kemiskinan yang kompleks baik dari segi ekonomi, budaya, sosial, psikologik, dan geografik yang sangat bervariasi di Indonesia. Rata-rata pendekatan dalam mengkaji kemiskinan masih berporos pada paradigma modernisasi (*modernisation paradigm*) yang dimotori oleh Bank Dunia. Paradigma ini bersandar pada teori-teori pertumbuhan ekonomi neo klasik (*orthodox neoclassical economics*) dan model yang berpusat pada produksi (*production-centred model*). Pendapatan nasional (GNP) mulai dijadikan indikator pembangunan tahun 1950-an, para ilmuwan sosial selalu merujuk pada pendekatan

tersebut manakala berbicara masalah kemiskinan satu negara. Pengukuran kemiskinan kemudian sangat dipengaruhi oleh *perspektif income poverty* yang menggunakan pendapatan sebagai satu-satunya indikator Garis Kemiskinan.

Menurut Nurwati, (2008), kemiskinan memiliki arti yang lebih luas dari sekedar lebih rendahnya tingkat pendapatan atau konsumsi seseorang, akan tetapi kemiskinan memiliki arti yang lebih dalam karena berkaitan dengan ketidakmampuan untuk mencapai aspek di luar pendapatan (*non-income factors*). Kesadaran akan kemiskinan akan dirasakan ketika membandingkan kehidupan yang sedang dijalani dengan kehidupan orang lain yang tergolong mempunyai tingkat kehidupan ekonomi lebih tinggi. Hal ini menyulitkan pemerintah ketika akan menentukan penduduk miskin, karena mereka (penduduk) sendiri tidak sadar akan kemiskinannya. Bisa saja seseorang itu pendapatan per kapitanya melampaui batas Garis Kemiskinan, tetapi secara struktural ia adalah orang yang jauh dari alat-alat produksi, jauh dari proses pengambilan keputusan, terasing dari kesempatan berpartisipasi (Yunanto, 2015). Penyebab lainnya dikarenakan implementasi kebijakan pemerintah yang seringkali gagal untuk mengelola kekayaan sumberdaya secara arif dan berkelanjutan. Akibatnya pemerintah tidak mampu menekan jumlah orang miskin yang secara struktural mereka hanya menjadi objek bukan subjek pembangunan (Winarwan, 2011).

Masalah kemiskinan bersifat multidimensional. Penyebabnya tidak hanya menjadi domain bidang ekonomi saja. Faktor politik, sosial, budaya dan sistem sosial lainnya juga berpengaruh. (Adawiyah, 2020).

Jenis kemiskinan yang banyak ditemukan terutama di negara-negara berkembang adalah kemiskinan struktural. Contohnya Negara Bosnia dan Herzegovina. Kemiskinan di pedesaan merupakan masalah yang belum terselesaikan, terutama kemiskinan di tingkat rumah tangga petani. Kemiskinan tersebut dipengaruhi oleh karakteristik struktural dari kepemilikan, rumah tangga, peternakan, serta kondisi iklim dan pasar, telah secara signifikan berkontribusi pada kemiskinan petani (Gava et al., 2021),

Negara Afrika menempatkan lebih banyak warga lanjut usia dalam risiko kemiskinan struktural. Penyebabnya adalah, pemerintah tidak menyertakan program-program tentang penuaan dalam agenda nasional dan pembangunan mereka, sehingga banyak orang tua di wilayah tersebut menjadi miskin. (Kola & Owumi, 2019).

Negara India dengan kemiskinan kronis struktural cukup tinggi di Bihar, Odisha, Maharashtra, dan Uttar Pradesh. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Dutta, 2021), menunjukkan bahwa, pengalaman kemiskinan masa lalu memang berpengaruh dalam menentukan status kemiskinan saat ini dari rumah tangga tertentu di India. Pendidikan perempuan menjadi solusi penting untuk keluar dari kemiskinan. Pemerintah membuat kebijakan yang penting untuk mengurangi kemiskinan secara lebih berkelanjutan, seperti program jaring pengaman sosial yang ditargetkan bersama dengan peningkatan tingkat keterampilan rumah tangga.

Penelitian yang dilakukan oleh (Dauda, 2017), di Nigeria meningkatnya kemiskinan di tengah tingginya pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan tanpa lapangan kerja, pertumbuhan yang tidak pro-miskin, dan kegagalan inisiatif pengentasan kemiskinan oleh pemerintah. Peneliti menyarankan komitmen pemerintah terhadap tata kelola pemerintahan yang baik, perang melawan korupsi, dan penyediaan perlindungan sosial bagi orang miskin dan rentan.

Amerika Latin mempunyai kemiskinan ekstrim dan kemiskinan moderat. Kemiskinan tersebut menunjukkan adanya perbedaan kemiskinan antara daerah pedesaan dan perkotaan. Ciri-cirinya ditentukan oleh mobilitas pendapatan yang lebih tinggi. (Stampini et al., 2016).

Tercatat di Republik Rakyat Tiongkok (RRT), bahwa dari 592 kabupaten, 357 kabupaten yang dilanda kemiskinan. Kabupaten tersebut termasuk dalam zona pembangunan yang dibatasi dan dilarang oleh perlindungan ekologi dan lingkungan. Tercatat 2.075 rumah tangga miskin di 13 Provinsi menunjukkan bahwa sumber pendapatan utama rumah tangga miskin adalah bercocok tanam, beternak, dan pekerjaan paruh waktu di daerah setempat. Rata-rata penduduknya mengalami kesulitan dalam akses untuk mengeksplorasi sumber daya yang tersedia di lingkungan mereka. Penyebabnya karena mereka masih mengelola pertanian dengan cara tradisional, belum ada desentralisasi pembangunan pedesaan. Rata-rata penduduk miskin Republik Rakyat Tiongkok (RRT) tinggal di daerah terpencil dan pegunungan. Pendidikan, dan keterampilan yang minim menyebabkan eksplorasi sumber daya di daerah mereka lebih banyak didominasi oleh pekerja asing. (Cai, 2018).

Kemiskinan struktural juga terjadi di Argentina, ditandai dengan adanya peningkatan populasi berdampak pada struktur kota yang meluas secara tidak terencana dan tidak diiringi dengan kebijakan perumahan dari pemerintah, sehingga akses terhadap lahan dan perumahan menjadi masalah serius. Penyebabnya karena sebagian besar pendatang cenderung bermukim di pinggiran barat dan utara kota, di wilayah-wilayah termiskin dan paling tidak diminati oleh pasar *real estate* dan wisata. Lingkungan dan pemukiman nya menunjukkan indikator sosial dengan tingkat kerentanan kesehatan dan sosio-ekonomi yang tinggi sebagai konsekuensi dari kurangnya layanan (listrik, air minum, gas, kesehatan), pengukuran tanah, dan transportasi umum. Lingkungan San Miguel, Agustín Pujol I dan II, antara lain, termasuk dalam wilayah ini dan memiliki persentase tertinggi rumah tangga dengan kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi (Navaz, 2018).

Negara Nepal mengalami kemiskinan struktural yang disebabkan kasta/etnis di negara ini sedang mengalami pertikaian sengit mengenai struktur kekuasaan politik. Temuan dari penelitian ini memperjelas, bahwa diskriminasi serta Sumber Daya Manusia dan aset lainnya memainkan peran penting dalam menjelaskan perbedaan kesejahteraan ekonomi dan kemiskinan, terutama di antara umat Hindu dan Janajatis dari kasta atas dan bawah. Kondisi tersebut merupakan dampak kekuatan struktural yang mengakar di mana umat Hindu dari kasta atas tetap memegang posisi dominan dalam perekonomian, pemerintahan, dan masyarakat.(Wagle, 2017).

Kemiskinan struktural di Indonesia memiliki banyak faktor, seperti kebijakan pemerintah, infrastruktur, dan akses terhadap sumber daya. Berikut angka rata-rata Tingkat Kemiskinan seluruh Provinsi yang ada di Indonesia selama enam tahun dari 2017 hingga 2022.



Gambar 1.1 Tingkat Kemiskinan Indonesia Tahun 2017-2022
Sumber (BPS RI, 2023)

Berdasarkan data dari BPS (2023), Provinsi Papua menjadi daerah dengan Tingkat Kemiskinan tertinggi di Indonesia selama periode 2017 hingga 2022. Rata-rata Tingkat Kemiskinannya sebesar 27,12 persen, padahal Provinsi Papua merupakan salah satu provinsi terkaya di Indonesia. Luas wilayahnya lebih tiga kali luas pulau Jawa, ditambah jumlah penduduk yang masih sedikit. Kekayaan alam begitu kaya dan belum digali seperti hasil hutan, perkebunan, pertanian, perikanan dan pertambangan.

Kemiskinan struktural di Papua tercermin pada kelompok penduduk asli Papua yang hidup di bawah Garis Kemiskinan. Pembangunan ekonomi yang terjadi di Papua sebagian besar berdampak bagi pendatang, bukan pada orang asli Papua. Orang asli Papua hanya sebagai objek dari proses pembangunan di Papua karena

tidak memiliki *skill* maupun pengetahuan untuk mengelola dan mengolah sumber daya alam di wilayahnya meskipun sebenarnya sumber daya alam melimpah.

Berdasarkan data yang dirilis BPS 2019 yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) masih rendah yakni 11,29 lebih rendah dibanding provinsi lainnya dan bahkan jauh dibawah HLS nasional 12,87. Belum maksimalnya penghapusan melek huruf, ditandai tingginya jumlah penduduk yang tidak atau belum pernah sekolah usia 7 sampai dengan 24 tahun sebanyak 16,02 persen. Penduduk putus sekolah 22,08 persen, menunjukkan bahwa orang yang bekerja di Papua lebih banyak didominasi oleh masyarakat dengan hanya tamatan SD saja. Posisi pekerjaan mereka lebih banyak hanya sebagai buruh tidak tetap/tidak dibayar. Faktanya masyarakat setempat justru tidak bisa menikmati kekayaan alam karena dikuasai oleh investor asing (pendatang) dan penguasa. Hal ini dibuktikan dengan data BPS Provinsi Papua, jumlah Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebanyak 184 unit, lebih sedikit dibanding Penanaman Modal Asing (PMA) sebanyak 323 unit di tahun 2020.

Tingkat kesehatan masyarakat Papua masih sangat buruk, terdapat 4,5 persen balita (0-23 bulan) yang menderita gizi buruk, hampir 30 persen balita mengalami stunting (BKKBN Papua, 2020). Angka ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan Provinsi lain, padahal untuk mendukung percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat telah dibuat Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020. Kenyataannya Provinsi Papua selalu berada pada posisi terbawah (kinerja pembangunan), ditambah maraknya persoalan

korupsi, lemahnya transparansi, dan akuntabilitas Pemerintah Daerah memperburuk kondisi perekonomian Papua (Hasibuan, 2021).

Beberapa penelitian terkait penyebab kemiskinan struktural di negara Indonesia antara lain, (Retnowati, 2011) dalam judul penelitiannya yaitu “Nelayan Indonesia Dalam Pusaran Kemiskinan Struktural (Perspektif Sosial, Ekonomi Dan Hukum)”. Penyebab kemiskinan struktural nelayan adalah minimnya modal yang dimiliki nelayan, tekanan dari pemilik modal, sistem bagi hasil yang tidak adil, perdagangan atau pelelangan ikan yang tidak transparan (dikuasai tengkulak) dan otoritas tidak punya wibawa untuk mengatur dan menegakkan aturan. Pola atau budaya kerja yang masih apa adanya, sehingga dari sisi ekonomi hasil tangkapan nelayan masih jauh dari memadai untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sedangkan Indonesia merupakan negara kepulauan, dengan 70 persen merupakan wilayah lautan.

Penelitian serupa dilakukan oleh (Pinem et al., 2019), di komunitas nelayan Kelurahan Sumber Jaya, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu. Menurut peneliti, faktor struktural mempengaruhi kemiskinan di komunitas nelayan tersebut. Faktor kemiskinan nelayan berasal dari pola hubungan produksi, pola hubungan sosial, kebijakan pemerintah, dan kategori lainnya.

Penelitian yang dilakukan oleh (Winarwan, 2011), menjelaskan bahwa penyebab timbulnya kemiskinan struktural adalah negara menjadi pengendali wilayah-wilayah perkebunan dan hutan. Masyarakat petani lokal sekitar hutan cenderung akan mengalami kesulitan memperoleh penghidupan (*livelihood*). Penyebabnya karena lahan-lahan pertanian lebih banyak dikuasai oleh negara

sehingga mempersempit bahkan cenderung meniadakan ruang gerak sosial, ekonomi, dan politik masyarakat petani lokal. Monopoli perusahaan lahan oleh negara dan pihak swasta, serta terjadinya konflik pertanahan yang berkepanjangan berdampak pada kerusakan hutan dan degradasi lingkungan yang telah menyebabkan berbagai bencana sosial dan lingkungan (seperti banjir, tanah longsor, dan kemarau panjang), sehingga kemiskinan struktural menjadi meningkat.

Kemiskinan di Indonesia diukur menggunakan Indikator Tingkat Kemiskinan, karena Tingkat Kemiskinan memberikan pengukuran yang kuantitatif dan objektif. Memudahkan peneliti untuk melacak perubahan dan tren kemiskinan dari waktu ke waktu, untuk pemantauan dan evaluasi efektivitas program-program pengentasan kemiskinan. Tingkat Kemiskinan menurun menunjukkan program yang diterapkan berhasil. Tingkat Kemiskinan dapat membantu dalam memahami perbedaan geografis dalam kemiskinan dan mengidentifikasi daerah yang memerlukan perhatian khusus.

Informasi tentang Tingkat Kemiskinan dapat membantu dalam alokasi sumber daya yang lebih adil dan efisien. Sumber daya dapat diarahkan ke daerah dan kelompok yang paling membutuhkan bantuan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Data Tingkat Kemiskinan di Kab/Kota Provinsi Jambi menurut hasil perhitungan dari BPS Provinsi Jambi adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2 Tingkat Kemiskinan Kab/Kota Provinsi Jambi tahun 2017-2022 (Persen)

Wilayah	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata
Kerinci	7,45	7,07	7,13	7,3	7,71	7,57	7,37
Merangin	9,43	8,88	8,48	8,63	9,11	8,7	8,87
Sarolangun	8,87	8,73	8,45	8,42	8,87	8,48	8,64
Batanghari	10,33	10,23	9,75	9,65	10,05	9,63	9,94
Muaro Jambi	4,37	4,05	3,83	3,83	4,53	4,47	4,18
Tanjung Jabung Timur	12,58	12,38	11,54	10,95	11,39	10,91	11,63
Tanjung Jabung Barat	11,32	11,1	10,56	10,29	10,75	10	10,67
Tebo	6,79	6,58	6,47	6,26	6,68	6,34	6,52
Bungo	5,82	5,78	5,6	5,8	6,23	5,38	5,77
Kota Jambi	8,84	8,49	8,12	8,27	9,02	8,33	8,51
Kota Sungai Penuh	2,78	2,76	2,81	3,03	3,41	2,97	2,96
PROVINSI JAMBI	8,19	7,92	7,6	7,58	8,09	7,62	7,83

Sumber : BPS Provinsi Jambi (2023)

Data pada Tabel 1.2 menunjukkan Tingkat Kemiskinan di Kab/Kota Provinsi Jambi tahun 2017-2022. Dasar penetapan Tingkat Kemiskinan tersebut oleh BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan, yang diukur dari sisi pengeluaran, atau dikenal dengan istilah Garis Kemiskinan. Jumlah dan persentase penduduk miskin (Tingkat Kemiskinan) pada setiap Kab/Kota dapat ditentukan oleh Garis Kemiskinan, dan bervariasi di setiap daerah. Kab. Tanjung Jabung Timur memperoleh rata-rata Tingkat Kemiskinan tertinggi di Kab/Kota Provinsi Jambi sebesar 11,63 persen selama tahun 2017-2022.

Kemiskinan di Kab. Tanjung Jabung Timur juga menjadi gambaran terjadinya kemiskinan struktural di Provinsi Jambi. Rata-rata penduduk miskin di tengah sumber daya alam yang melimpah seperti pertambangan minyak dan gas bumi. Nilai ekspor untuk sub sektor komoditi pertambangan sebesar US\$ 1.304.594.833, namun sangat disayangkan dari sisi pemanfaatannya belum sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat. (Ardi,2022).

Penelitian terkait penyebab kemiskinan yang terjadi di Kab. Tanjung Jabung Timur pernah dilakukan oleh (Rahman & Afa, 2022), Penelitiannya menjelaskan bahwa Kab. Tanjung Jabung Timur merupakan daerah yang kaya akan hasil pertambangan. Kekayaan yang begitu besar ternyata tidak bisa menjadi pengharapan bagi masyarakat Kab. Tanjung Jabung Timur untuk keluar dari kemiskinan. Minyak dan gas bumi belum bisa mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi hingga menyentuh level 5 (lima) persen atau mengangkat peringkat Kab. Tanjung Jabung Timur di atas Kab/Kota lain di Provinsi Jambi. Eksploitasi yang melimpah pada kegiatan pengeboran sumber daya alam minyak dan gas bumi pada beberapa daerah utama penghasil pertambangan, terkadang bersifat capital intensif, kaya modal namun minim pengadaan Sumber Daya Manusia. Penduduk lokal tidak ditempatkan pada level manajerial, dikarenakan pendidikan yang rendah, sehingga mereka tidak mampu memanfaatkan dan mengolah sumber daya yang tersedia. Mereka hanya berprofesi sebagai buruh harian lepas dan nelayan biasa yang memiliki pendapatan rendah sehingga tidak bisa keluar dari lingkaran kemiskinan.

Menurut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Provinsi Jambi untuk Tahun 2017 hingga 2022, juga menyebutkan bahwa capaian Tingkat Kemiskinan Pemerintah Provinsi Jambi rata-rata tidak sesuai target.

Tabel 1.3 Target dan realisasi Tingkat Kemiskinan Provinsi Jambi tahun 2017-2022 (persen)

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata
Target Tingkat Kemiskinan	8,05	7,8	7,70	7,57	7,4	7,9	7,74
Realisasi Tingkat Kemiskinan Prov Jambi	8,19	7,92	7,6	7,58	8,09	7,62	7,83

Sumber : LkjIP Provinsi Jambi

Berdasarkan Tabel 1.3, rata-rata capaian Tingkat Kemiskinan Provinsi Jambi sebesar 7,83 persen lebih besar dibandingkan target yang telah ditetapkan, hanya dua tahun saja yang dibawah target yaitu tahun 2019 dan 2022. Untuk mengatasi kemiskinan diperlukan program-program pengentasan kemiskinan yang tepat sasaran. Pemerintah telah membuat program BOS (Bantuan Operasional Sekolah), RASKIN (Beras Miskin), BLT (Bantuan Langsung Tunai), Asuransi Miskin, Program pengembangan Kecamatan, Program Pengentasan Kemiskinan di Perkotaan, Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan dan diperkuat program-program kementrian/lembaga, Program Keluarga Harapan (PKH), berupa bantuan khusus untuk pendidikan dan kesehatan (Murdiyana & Mulyana, 2017).

Provinsi Jambi juga melakukan program untuk mengatasi kemiskinan. Menerapkan strategi dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia, untuk mengelola sumber daya alam. Tujuannya untuk meningkatkan perekonomian Kab/Kota di Provinsi Jambi sebagai upaya pengentasan kemiskinan. (Nurafni et al., 2021).

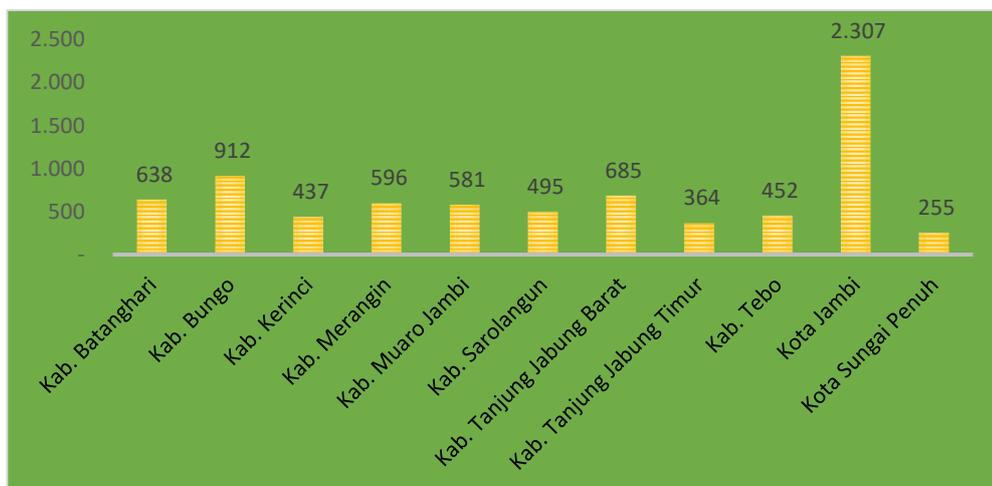
Pemerintah Daerah memerlukan sumber dana untuk membiayai program-program pengentasan kemiskinan, antara lain bersumber dari Pendapatan Daerah. Pemerintah Daerah menerapkan kebijakan fiskal dalam penerimaan dan pengeluaran APBD. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat dengan PAD, harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar. PAD juga dijadikan salah satu barometer dalam keberhasilan pelaksanaan Otonomi Daerah (Simbolon & Elviani, 2017). PAD menjadi Sumber utama pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Semakin banyak pendapatan yang dihasilkan oleh daerah, maka daerah akan semakin mampu melaksanakan pembangunan di daerahnya masing masing (Manek & Badrudin, 2017).

Otonomi Daerah walaupun sudah berjalan di tiap Kabupaten dan Kota, namun PAD di daerah tidak dapat diandalkan sepenuhnya untuk membiayai semua program pembangunan. Pemerintah Daerah belum sepenuhnya lepas dari pemerintah pusat atau masih belum mandiri secara keuangan. Pemerintah Daerah masih mengharapkan bantuan dana transfer dari Pemerintah pusat seperti Dana Alokasi Umum selanjutnya disebut DAU, Dana Alokasi Khusus selanjutnya disebut DAK, dan Dana Bagi Hasil selanjutnya disebut DBH (Harahap, 2013).

Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK, 2021) menyatakan bahwa dari 503 Pemerintah Daerah di Indonesia, 443 Pemerintah Daerah atau 88,07 persen berstatus belum mandiri dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal ini membuat mereka masih bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat.

PAD dan Dana Transfer dari Pusat seperti DAU, DAK dan DBH menjadi komponen penting bagi penerimaan dan pengeluaran APBD. Fungsinya untuk mengatasi permasalahan ekonomi yang dihadapi suatu daerah seperti kemiskinan. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian dari (Nany et al., 2022), yang menunjukkan bahwa PAD, DBH, DAU, DAK, secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan.

Daerah dituntut untuk mampu mengurus pembiayaan daerahnya sendiri dengan kekuatan utama yang bertumpu pada PAD. Jumlah realisasi PAD Kab/Kota Provinsi Jambi tahun 2017-2022 dalam satuan milyar rupiah, seperti pada gambar berikut ini.



Gambar 1.2 Jumlah realisasi PAD Kab/Kota Provinsi Jambi tahun 2017 2022

Sumber (djpk RI, 2023)

Berdasarkan Gambar 1.2 dengan sumber data dari djpk.RI. PAD tertinggi di peroleh Kota Jambi yaitu sebesar Rp. 2.307 milyar. Kota Sungai Penuh memperoleh PAD yang terendah yaitu sebesar Rp. 255 milyar. Rata-rata jumlah PAD tahun 2017-2022 Kab/Kota Provinsi Jambi cenderung meningkat, meskipun menurun pada tahun-tahun tertentu.

Perbedaan realisasi PAD di Kab/Kota Provinsi Jambi dipengaruhi oleh potensi Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia, PDRB, Jumlah Tenaga Kerja, Investasi, Pengeluaran Pemerintah dan Inflasi. Penjelasan tersebut sesuai dengan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh (Siwi et al., 2021) dan (Tianto, 2022).

Peran PAD yang sangat penting dalam mengatasi kemiskinan sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Rasu et al., 2019) yaitu PAD berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan. Artinya jika PAD meningkat, Tingkat Kemiskinan akan mengalami penurunan. PAD adalah indikator dalam mengukur kemiskinan suatu daerah, semakin besar penerimaan PAD akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menurunkan angka kemiskinan. Dukungan Pemerintah Pusat terhadap Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat guna mengurangi Tingkat Kemiskinan yaitu melalui pemberian dana transfer (*intergovernmental transfers*) yang diperoleh dari DAU. DAU merupakan dana transfer yang pemanfaatannya diserahkan sepenuhnya kepada daerah. DAK sebagai dana transfer yang sudah ditentukan penggunaannya, dan DBH yang keseluruhannya bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah (Putra et al., 2023).

Jumlah Realisasi DAU Kab/Kota Provinsi Jambi tahun 2017-2022 dalam satuan milyar rupiah, adalah sebagai berikut.

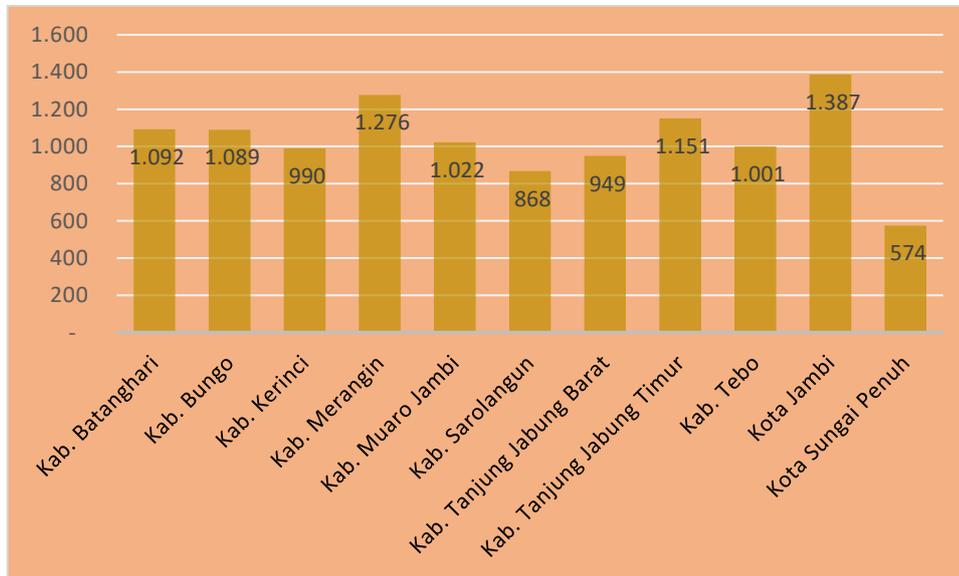


Gambar 1.3 Jumlah realisasi DAU Kab/Kota Provinsi Jambi tahun 2017-2022

Sumber (djpk RI, 2023)

Berdasarkan Gambar 1.3, DAU Kab/Kota Provinsi Jambi selama periode 2017-2022 berjumlah sebanyak Rp 38.422 milyar. DAU tertinggi dicapai oleh Kota Jambi yaitu sebesar Rp. 704,17 milyar. DAU terendah dicapai oleh Kota Sungai Penuh yaitu sebesar Rp. 418,78 milyar. Pemerintah Daerah Kab/Kota di Provinsi Jambi, diharapkan mampu memberi layanan yang lebih baik kepada publik, sehingga DAU dapat bermanfaat terhadap masyarakat miskin.

Jumlah Realisasi DAK Kab/Kota Provinsi Jambi tahun 2017-2022 dalam milyar rupiah, sebagai berikut :



Gambar 1.4 Jumlah realisasi DAK Kab/Kota Provinsi Jambi tahun 2017-2022
Sumber (djpk RI, 2023)

Berdasarkan Gambar 1.4 diatas, DAK Kab/Kota Provinsi Jambi tahun 2017-2022 berjumlah Rp. 11.400 milyar. DAK tertinggi dicapai oleh Kota Jambi yaitu sebesar Rp. 1.387 milyar. DAK terendah dicapai oleh Kota Sungai Penuh yaitu sebesar Rp. 574 milyar.

Pemanfaatan DAK diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana fisik. Investasi dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang, dan tidak termasuk penyertaan modal.

Menurut Manek & Badrudin, (2017), Pemerintah Daerah dapat mengoptimalkan Belanja Modal melalui DAK. Penyebabnya karena DAK akan menambah aset tetap yang dimiliki pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik yang berguna untuk mengatasi kemiskinan. Faktanya kondisi yang

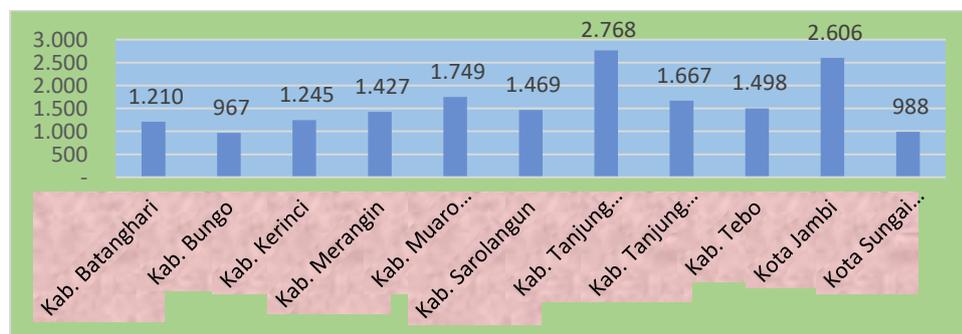
diharapkan tersebut tidak sesuai dengan hasil penelitian dari (Rasu et al., 2019). DAK berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan. Artinya apabila DAK meningkat maka Tingkat Kemiskinan juga meningkat.

Dana Transfer yang menunjang Pendapatan Daerah selanjutnya adalah DBH. Sumber DBH berasal dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase. Tujuannya untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Menurut Isramiwarti et al., (2017), DBH akan mendorong pertumbuhan ekonomi di setiap daerah. Pertumbuhan ekonomi akan berdampak pada distribusi pendapatan yang berefek pada pengentasan kemiskinan. Untuk mengatasi permasalahan ekonomi yang dihadapi suatu daerah seperti kemiskinan, dapat diminimalisir oleh kebijakan Pemerintah Daerah melalui pengeluaran APBD. Menurut Dana, (2018), Syahidin & Jalil. M, (2020) dan Khawarizmi et al., (2021), untuk menurunkan persentase penduduk miskin Pemerintah Daerah memerlukan anggaran belanja di setiap periodenya, pengelolaan dana yang baik dan mengalokasikan belanja Pemerintah Daerah untuk kepentingan publik.

Pengalokasian belanja yang tepat sasaran berdampak pada pelayanan masyarakat, meningkatnya kesejahteraan masyarakat, dan meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah. Pemanfaatan belanja pemerintah hendaknya dialokasikan untuk hal-hal produktif. Misalnya untuk melakukan aktivitas pembangunan, pemanfaatan sumber daya yang optimal, dan kualitas peningkatan Sumber Daya Manusia (Paseki et al., 2014).

Pengeluaran Daerah dialokasikan dalam bentuk Belanja Daerah. Salah satunya adalah Belanja Modal, yaitu pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode. Belanja Modal tersebut meliputi perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset yang tidak berwujud. Belanja Modal harus dikeluarkan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai manfaat lebih dari 12 bulan (Susilowati et al., 2017).

Belanja Modal Kab/Kota Provinsi Jambi diasumsikan untuk sektor publik, yang memiliki tujuan untuk menurunkan angka kemiskinan. Jumlah realisasi Belanja Modal Kab/Kota Provinsi Jambi tahun 2017-2022 dalam milyar Rupiah, seperti pada Gambar 1.5 berikut ini.

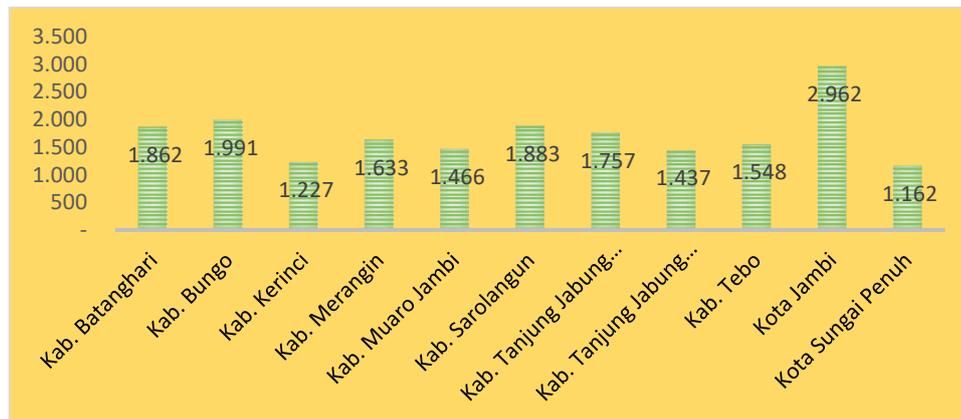


Gambar 1.5 Jumlah realisasi Belanja Modal Kab/Kota Provinsi Jambi tahun 2017-2022
Sumber (djpk RI, 2023)

Berdasarkan Gambar 1.5, Belanja Modal Kab/Kota Provinsi Jambi tahun 2017-2022 berjumlah sebanyak Rp. 17.593 milyar. Belanja Modal yang tertinggi dicapai oleh Kab. Tanjung Jabung Barat yaitu sebesar Rp. 2.768 milyar. Belanja Modal yang terendah dicapai oleh Kab. Ma. Bungo yaitu sebesar Rp. 967 milyar. Investasi modal (Belanja Modal) diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik terhadap pembangunan yang bermanfaat demi mengatasi

kemiskinan. Untuk mencapai sasaran tersebut, diperlukan sarana dan prasarana terutama dukungan dana yang memadai untuk Belanja Modal.

Kebijakan Pemerintah Daerah dalam bentuk kebijakan fiskal melalui pengeluaran Pemerintah Daerah merupakan alat intervensi pemerintah terhadap perekonomian yang dianggap paling efektif. Belanja langsung seperti Belanja Barang Jasa diharapkan dapat menanggulangi masalah kemiskinan di Kab/Kota Provinsi Jambi. Berikut jumlah realisasi Belanja Barang Jasa Kab/Kota Provinsi Jambi Tahun 2017-2022 dalam milyar rupiah.



Gambar 1.6 Jumlah realisasi Belanja Barang Jasa Kab/Kota Provinsi Jambi tahun 2017-2022

Sumber (djpk RI, 2023)

Berdasarkan Gambar 1.6, Belanja Barang dan Jasa 11 Kab/Kota Provinsi Jambi selama periode 2017 hingga 2022 berjumlah sebanyak Rp. 18.928 milyar. Belanja Barang dan Jasa tertinggi diperoleh Kota Jambi yaitu sebesar Rp. 493,69 milyar. Belanja Barang dan Jasa yang terendah dicapai oleh Kota Sungai Penuh yaitu sebesar Rp. 193,60 milyar.

Belanja Barang Jasa adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai, untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Pengadaan barang untuk diserahkan dan dijual kepada masyarakat, dan belanja perjalanan dinas ASN (Huda & Karsudjono, 2021). Belanja Barang dan Jasa yang efisien akan menghemat anggaran Pemerintah Daerah, yang dapat digunakan untuk membiayai program-program pengentasan kemiskinan.

Penerimaan Daerah yang bersumber dari PAD, DAU, DAK dan DBH Kab/Kota Provinsi Jambi tahun 2017-2022 rata-rata realisasinya meningkat setiap tahun. Pengeluaran Daerah seperti Belanja Modal dan Belanja Barang Jasa realisasinya juga meningkat. Pengaruh PAD, DAU, DAK dan DBH dan Belanja Daerah terhadap Tingkat Kemiskinan telah diteliti oleh beberapa peneliti sebelumnya antara lain, (Rasu et al., 2019), di Kota Manado. Hasil penelitiannya yaitu PAD dan DBH berpengaruh negatif terhadap kemiskinan, DAU dan DAK berpengaruh positif terhadap kemiskinan.

Berdasarkan fenomena diatas realisasi Penerimaan Daerah seperti PAD, DBH, DAU, DAK, dan pengeluaran daerah seperti Belanja Modal dan Belanja Barang dan Jasa tahun 2017-2022 di Kab/Kota Provinsi Jambi mengalami peningkatan. Program-program pengentasan kemiskinan pun sudah dilakukan, sumber daya alam melimpah seperti Batu bara, Minyak dan gas bumi, namun kemiskinan di Kab/Kota Provinsi Jambi masih tetap ada, terutama didaerah penghasil utama sumber daya alam, kurang begitu berdampak kepada kesejahteraan masyarakat disekitarnya.

Tingkat Kemiskinan Kab/Kota Propinsi Jambi cenderung menurun namun capaian Tingkat Kemiskinannya rata-rata tidak sesuai target. Artinya ada masalah dan kendala dalam menjalankan kebijakan pembangunan oleh pemerintah. Fenomena tersebut menjadi suatu fakta yang menarik untuk diteliti dan peneliti akan mencoba menganalisis **Determinan Tingkat Kemiskinan dari Sisi Penerimaan dan Pengeluaran Daerah Kab/Kota Provinsi Jambi tahun 2017-2022.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Kondisi perkembangan Tingkat Kemiskinan PAD, DAU, DAK, DBH, Belanja Modal dan Belanja Barang Jasa Kab/Kota Provinsi Jambi tahun 2017-2022.
2. Bagaimana Pengaruh PAD, DAU, DAK, DBH, Belanja Modal dan Belanja barang dan Jasa terhadap Tingkat Kemiskinan Kab/Kota Provinsi Jambi tahun 2017-2022.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah:

- 1) Untuk menganalisis kondisi perkembangan Tingkat Kemiskinan, PAD, DAU, DAK, DBH, Belanja Modal dan Belanja Barang Jasa Kab/Kota Provinsi Jambi tahun 2017-2022.

- 2) Untuk menganalisis pengaruh PAD, DAU, DAK, DBH, Belanja Modal dan Belanja Barang dan Jasa terhadap Tingkat Kemiskinan Kab/Kota di Provinsi Jambi tahun 2017-2022.

1.4 Manfaat Penelitian.

Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai berikut :

- 1) Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang kondisi kemiskinan di Kab/Kota Provinsi Jambi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran daerah. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Daerah dalam merumuskan kebijakan dan program yang tepat untuk mengatasi masalah kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

- 2) Manfaat akademis:

Hasil penelitian ini dapat mengembangkan pengetahuan dan wawasan tentang kemiskinan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, khususnya di Kab/Kota Provinsi Jambi. Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu ekonomi, sosial, dan pembangunan, khususnya dalam bidang analisis kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat.